

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke empat didunia dengan mayoritas beragama Islam. Dengan mayoritas penduduknya yang berpendudukan muslim, maka dari situlah Indonesia menjadi negara Islam terbesar didunia.

Dalam hubungannya Indonesia dengan negara negara Islam lainnya, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara berpenduduk muslim yang paling peduli dengan keadaan atau kondisi sesama negara Islam didunia.

Karena itu Indonesia sering bergabung dan aktif dalam suatu forum atau organisasi berbasis Islam didunia guna memecahkan masalah suatu negara baik itu masalah ekonomi, sosial, konflik politik, serta masalah HAM.

Diantaranya Indonesia sangat berperan aktif pada forum kerjasama Internasional yakni pada Organisasi Kerjasama Islam(*Organization of Islamic Cooperation/OIC*). OKI yang bermarkas di Jeddah, Arab Saudi, dengan 57 negara anggota ini merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. Semula organisasi ini bernama Organisasi Konferensi Islam (*Organization of Islamic Conference/OIC*), namun pada 28 Juni 2011 berganti nama menjadi Organisasi Kerja Sama Islam (*Organization of Islamic Cooperation/OIC*)¹

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) 2013. Indonesia siap menjadi tuan rumah OKI 2013 Jakarta. (<http://www.kemlu.go.id/Documents/Akuntabilitas/LAKIP%20Kemlu%202013.berbentuk.pdf>) diakses pada Minggu, 1 Mar, 2015 07:40 AM

Indonesia memiliki posisi yang unik dalam OKI. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai Negara Islam. Namun, Islam di Indonesia adalah Islam moderat yang toleran dan bisa berdampingan dengan agama/kepercayaan lain. Bagi Indonesia, OKI adalah salah satu wahana untuk menunjukkan citra positif Islam moderat seperti yang dianut di Indonesia dihadapan masyarakat Internasional. Lebih jauh lagi, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan seoptimal mungkin keberadaan OKI untuk menggalang dukungan bagi Indonesia, tidak hanya sekedar untuk mengamankan posisi RI, tetapi juga dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD RI tahun 1945. Sementara itu, merujuk pada Keppres RI Nomor 64 Tahun 1999 peluang partisipasi Indonesia di OKI tidak akan maksimal mengingat adanya usulan penghentian Indonesia dari badan subsider OKI.²

Partisipasi Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terjadi pada tahun 1970 yang bersifat dualistik berarti; di satu sisi sebagai negara terbesar Islam di dunia, dan di sisi lain, dalam konstitusinya (UUD 1945) Indonesia bukan sebagai negara Islam. Dengan demikian posisi Indonesia bersifat unik di forum OKI. Begitu juga dalam waktu yang sama, Indonesia bergabung dalam *D8 Developing-Eight* (D8) didirikan oleh delapan negara berkembang dengan jumlah penduduk muslim besar, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki dan Pakistan.³, perkumpulan atau asosiasi

² Tabloid Diplomasia, Sunu Mahadi Sumarno Direktur Sosial, Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jurnal Edisi - April 2011 Sunday, 24 April 2011 05:36

³ Ide mengenai pembentukan D-8 (Developing-Eight) dicetuskan oleh Dr. Necmetin Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki, di dalam seminar tentang Kemitraan dalam Pembangunan, bulan Oktober 1996 yang kemudian berlanjut menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. Kemlu Buletin Diplomasia Multilateral PERAN INDONESIA PADA KERJA SAMADEVELOPING-EIGHT (D-8) Oleh: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.
<http://www.kemlu.go.id/Magazines/Buletin%20Diplomasia%20Multilateral%20Vol.%20I%20No.%201%20Tahun%202012.pdf> diakses pada minggu 1 Mar 2015 09:15 AM

Negara-negara Islam (OKI) yang relatif maju sehingga perdagangan antarmereka (intratrade) D8 cenderung berdagang dengan negara-negara barat yang maju.⁴

Indonesia telah tampil sebagai teladan dimana nilai-nilai Islam dapat selaras dengan modernitas dan demokrasi. Keanggotaan Indonesia di OKI bermula sejak organisasi ini berdiri pada tahun 1969, dan sebagai anggota Indonesia senantiasa menekankan beberapa hal penting dalam agenda OKI, antara lain pemberdayaan potensi kapasitas negara-negara anggota OKI dalam memainkan perannya memelihara perdamaian dan keamanan global, serta peningkatan upaya pemberantasan kemiskinan dan percepatan pembangunan. Indonesia juga mendorong pemahaman bahwa Islam sebagai agama perdamaian dan bertoleransi tinggi, selaras atau compatible dengan demokrasi, dan modernitas maupun HAM⁵.

Dengan predikat tersebut, Indonesia dapat mengambil sejumlah peluang dengan menjadikan OKI sebagai Organisasi multilateral non-PBB yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan Indonesia di kancah internasional. Melalui OKI, Indonesia juga dapat menawarkan program-program nasional yang bisa dikembangkan oleh negara-negara anggota OKI lainnya. Sebagai contoh peningkatan pembangunan ekonomi, program anti korupsi, *Good Governance*, penegakkan HAM, dan hak-hak perempuan. Peluang Indonesia untuk memimpin OKI semakin terbuka pada KTT OKI tahun 2014 yang diselenggarakan di Jakarta. Pemerintah Indonesia memiliki modal dasar yang kuat terkait peranan-peranan di dunia internasional. Pertama, sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia menjadi kekuatan penting pada abad ke 21 terkait dengan

⁴ Arif, Mohammed. 1998 Proliferation of Regional Groupings: Policy Options for the OIC, *Journal of Economic Cooperation*, 15-30. Pada Jurnal dan Penelitian Kerja Sama Indonesia Dengan Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (oki) Reformasi Administrasi Volume. I No. 1 Maret 2014 http://www.stiami.ac.id/jurnal/detail_jurnal/19/95-kerja-sama-indonesia-dengan-negara-negara-anggota-organisas.pdf

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) Optimalisasi Diplomasi Indonesia di Organisasi Konferensi Islam, Bandung, 7 April 2011 No. 059/PR/IV/2011/53 Hal. http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail- diakses, 18 November 2014

pembangunan demokrasi. Di dunia Islam selain Malaysia dan Turki. Konsep demokrasi dan toleransi sulit diterapkan secara penuh oleh negara-negara anggota OKI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya konflik kekerasan hingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit dalam pelaksanaan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Kedua, sebagai ketua ASEAN, posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Permasalahannya adalah mampu tidaknya pemerintah mengelola potensi strategis sebagai ketua ASEAN tersebut. Ketiga, Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia dan kawasan sekitarnya. Dalam hal tersebut Indonesia dipandang mampu untuk berperan sebagai teladan (*role of model*) untuk negara-negara anggota OKI lainnya.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI, *OIC, the Organization of Islamic Countries*) yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam dibentuk berdasarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko, pada 25 September 1967 sebagai hasil munculnya aksi yang terjadi di Mesjid Al-Aqsa–Jerusalem. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini beranggotakan 57 negara, termasuk Indonesia, yang mencakup tiga kawasan yaitu Asia, Timur Tengah atau Arab dan Afrika.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Selain itu, OKI dipandang sebagai organisasi internasional yang lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina.

Kenyataan lemahnya koordinasi dan daya tawar (*leverage*) negara-negara Muslim dalam berbagai isu global, termasuk penanganan konflik yang sebagian besar justru berada di negara-negara anggota OKI sendiri melatarbelakangi pembahasan isu

restrukturisasi dan revitalisasi OKI. Selain itu, OKI dipandang hanya menjadi organisasi yang menyuarakan kepentingan sekelompok negara.⁶

Tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, Organisasi Kerja Sama Islam (*Organization of Islamic Cooperation/OIC*) ini bertujuan pula dalam memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara anggota dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan serta memperkuat perjuangan masyarakat Muslim diseluruh dunia untuk melindungi harga diri, kemerdekaan dan hak-hak mereka sebagai suatu negara.⁷

Pada awalnya OKI mempunyai anggota 25 negara dan saat ini telah menjadi 57 negara anggota. OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan HAM.

Kini OKI memiliki 57 negara anggota serta sejumlah negara pengamat, yang mencakup tiga kawasan yaitu Asia, Arab dan Afrika. Antara lain Bosnia Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading dan Thailand.

OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan HAM. Tujuan pembentukan OKI adalah dalam rangka meningkatkan solidaritas Islam serta mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi dan sosial-budaya antar negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional,

⁶ Hassan, M. Kabir and Faridul Islam, (2001) Prospect and Problems of a Common Market: An Empirical Examination of the OIC Countries, American Journal of Islamic Social Sciences, 19 -46 Pada Jurnal dan Penelitian Kerja Sama Indonesia Dengan Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (oki) Reformasi Administrasi Volume. I No. 1 Maret 2014

http://www.stiami.ac.id/jurnal/detail_jurnal/19/95-kerja-sama-indonesia-dengan-negara-negara-anggota--organisas.pdf

⁷ Djumadi M. Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2008, hal. 51

serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Krisis Politik yang Melanda Negara-Negara Anggota OKI sejak Awal Januari 2011 ketika Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Krisis ini menunjukkan bahwa dunia Islam saat itu membutuhkan “*role of model*” dalam proses transisi dan demokrasi. Sebagai salah satu anggota OKI dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia dipandang mampu untuk berperan sebagai teladan *role of model* bagikeserasian antara Islam, modernitas dan demokrasi damai, serta sebagaibridge build hubungan Barat dan Islam.⁸

Sebagai salah satu anggota OKI dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia dipandang mampu untuk berperan sebagai teladan *role of model* bagi keserasian antara Islam, modernitas dan demokrasi damai, serta sebagai bridge builder hubungan Barat dan Islam. Tuntutan untuk ikut berperan dalam upaya perdamaian bagi Negara-negara anggota termasuk Indonesia sejalan dengan *Mecca Declaration and Ten-Years Program of Actions Organization of The Islamic Conference (TYPOA-OIC)* yang tidak hanya fokus pada isu politik, tetapi juga isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Melalui deklarasi ini, OKI diharapkan mampu membangun nilai-nilai toleransi, modernitas, demokrasi, memerangi terorisme, membendung Islamophobia, meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara anggota, *conflict prevention*, penanggulangan masalah Palestina, Filipina Selatan, Kashmir yang tak kunjung usai, serta masalah-masalah yang

⁸ Ibid (kemenlu 2013)

terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Lantas, bagaimanakah Indonesia menempatkan partisipasi dan kontribusinya di OKI sebagai bagian integral dari kepentingan diplomasi dan politik luar negerinya? Langkah apa saja yang ditempuh Indonesia dalam proses transformasi yang kini tengah berlangsung di OKI?⁹

Selain itu, OKI juga bergiat pada isu-isu non-ekonomi seperti isu sosial, budaya dan isu lainnya. Salah satu yang dilakukan oleh OKI di Indonesia adalah konferensi OKI tentang HAM (hak asasi manusia) yang diselenggarakan di Jakarta pada Februari 2012.

Adapun isu-isu yang terkait tentang HAM di Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini mulai serius menggarap isu Hak Asasi Manusia (HAM). Keseriusan ini tampak dalam pertemuan pertama Komisi Permanen dan Independen Hak Asasi Manusia Organisasi Kerja Sama Islam (*OIC-Independent Pemanent Human Rights Commission/IPHRC*), atau biasa disebut Komisi HAM OKI, di Jakarta pada tanggal 20-24 Februari 2012. Sebanyak 17 Komisioner dari 18 anggota Komisi, wakil dari 24 negara OKI, dan 2 wakil dari negara observer hadir dan aktif dalam kesempatan tersebut. Bahkan, pakar-pakar internasional di bidang HAM dan anggota anggota organisasi masyarakat sipil turut meramaikan pertemuan tersebut.

Komisi HAM OKI dibentuk pada Pertemuan Tingkat Menteri (*Council of Foreign Ministers/CFM*) ke-38 di Astana, Karzhkastan pada Juni 2011. Di awal kiprahnya ini, Komisi HAM OKI mulai menggodok secara komprehensif draft rule of procedure (tata kerja) dan mandat mereka. Para Komisioner juga membahas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di negara-negara anggota OKI serta situasi dan isu HAM pada Agenda OKI. Situasi di Palestina dan wilayah okupasi Arab lainnya pun ditetapkan juga menjadi agenda permanen Komisi. Tentunya hal ini tidak terlepas dari alotnya pembahasan untuk isu-isu yang sulit disepakati, misalnya tentang hubungan antara

⁹ Dalam, <https://muhammadfahry.wordpress.com/2011/04/22/revitalisasi-peran-indonesia-di-oki/> Oleh : Muhammad Fakhry Ghafur Posted on 04/22/2011 diakses pada sabtu 28 februari 2015 pukul.11:45

standar dan prinsip HAM universal dengan nilai-nilai Islam. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wardana menyampaikan harapan Indonesia, agar Komisi HAM OKI dapat menjadi salah satu kekuatan pendorong reformasi proses transformasi OKI untuk menjadi organisasi yang efektif. Komisi ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang benar tentang kompatibilitas nilai-nilai Islam, HAM, dan demokrasi.

Peranan Indonesia cukup menonjol dalam Komisi HAM OKI. Sebabnya, pertama, Indonesia menjadi tuan rumah untuk Pertemuan Pertama. Kedua, komisioner perempuan dari Indonesia, Siti Ruhaini Dzuhayatin, pakar HAM, didaulat sebagai *chairperson interim* dalam pertemuan tersebut. Hal ini memberikan warna sendiri bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menerapkan demokrasi, dan mampu melahirkan tokoh perempuan yang sanggup berkontribusi di level global dan berperan dalam memimpin negara-negara Islam lainnya untuk mencari terobosan dalam suatu isu yang dipandang sangat krusial di dunia internasional. Komisi ini pun telah menetapkan agenda rutin dan prioritas agenda berikutnya, antara lain: 'hak-hak wanita dan anak-anak, hak atas pembangunan, hak atas pendidikan, isu-isu HAM pada agenda OKI, dan kerja sama dengan negara anggota OKI dalam pemajuan dan perlindungan HAM'.

Sedangkan, dari aspek nilai strateginya, pertemuan tersebut telah mampu menyedot perhatian besar dari *civil society* serta media nasional dan internasional. Berbagai pemberitaan media massa banyak menyorot keberhasilan Komisi HAM OKI dalam menampilkan komisioner perempuan.¹⁰

Ketika melihat lebih jauh, gejolak yang terjadi negara-negara anggota OKI, menggambarkan adanya kekurangsiapan dalam transisi demokrasi. Sebagai contoh adalah konflik yang terjadi di Libya. Jatuhnya Khadafi adalah bentuk kegagalan transisi

¹⁰*Prospect and Problems of a Common Market: An Empirical Examination of the OIC Countries, American Journal of Islamic Social Sciences, 19 -46.* Tulisan ini dimuat juga dalam Tabloid Diplomasi (Jurnal Edisi - Maret 2012 Monday, 19 March 2012 22:44) pada hal. <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/153-diplomasi-maret-2012/1357-indonesia-mendorong-kerjasama-oki-meningkatkan-pemajuan-ham.html>.

demokrasi. Keinginan rakyat Libya untuk melihat adanya demokrasi di negaranya, mendapat tentangan dari Pemerintah Khadafi, sehingga terjadi konflik politik yang berekses pada kontak senjata. Kegagalan transisi demokrasi ini juga telah membuat beberapa negara Dunia Islam terus terjebak dalam konflik.

Untuk itu, negara-negara Islam saat ini membutuhkan *role of model*, contoh sebuah transisi demokrasi yang sukses. Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, bisa menjadi *role of model*, bagaimana mengintegrasikan semua kepentingan dalam sebuah sistem demokrasi yang damai.

Indonesia pernah mengalami demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno. Untuk menjadi negara demokrasi seperti sekarang ini, Indonesia harus melalui lebih dari 35 tahun masa otoriter di bawah kendali Presiden Soeharto. Tahun 1998 menjadi titik transisi demokrasi di Indonesia. Era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto, kemudian diikuti Pemilu langsung menjadi cikal bakal kehidupan demokrasi.

Keberhasilan melakukan transisi demokrasi inilah yang harus menjadi ‘pembelajaran’ negara-negara Islam, khususnya yang sedang bergejolak saat ini. Bagaimana pun juga, demokrasi ini sangat penting di tengah modernisasi dunia. Sudah saatnya negara-negara Islam membuka diri, bagaimana membangun sebuah demokrasi, dan berhubungan dengan negara lain dalam kerangka modernisasi.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, resistensi Indonesia dengan Barat sangat kecil. Hal ini berbeda dengan pola hubungan yang dibangun sejumlah negara Islam dengan Barat yang memiliki resistensi tinggi. Sekarang ini, Indonesia bahkan menjadi *rule of model* negara-negara barat yang mengklaim dirinya sebagai pelopor demokrasi.

Mengingat peran strategis Indonesia dalam membantu negara-negara Islam mengatasi gejolak di negeri, pada KTT ke-12 OKI di Mesir atas kedatangan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana saat itu Mesir tengah bergejolak saat itu patut di apresiasi. Kehadiran SBY menunjukkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dan berkepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian negara-negara Islam.

Kehadiran SBY menjadi sangat tepat. Karena selain bisa memberikan model transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia, juga bertepatan dengan tema yang diangkat, yaitu *'The Muslim World: New Challenges and Expanding Opportunities'*. Tema tersebut relevan dengan kondisi Islam saat ini dalam menempatkan diri dan menatap masa depan. Dalam hal ini, OKI harus bisa menjadi wadah bagi negara-negara Islam dalam menciptakan perdamaian, menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta meningkatkan kesejahteraan dunia.

Ada tiga hal menarik yang disampaikan SBY, saat memberikan sambutan di depan para pemimpin negara Islam pada KTT ke-12 OKI di Mesir 6 Februari 2011.

Pertama, OKI harus menjadi net contributor terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Pandangan SBY ini cukup relevan, karena dengan menjadi net contributor, OKI akan dapat membantu mengatur dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara Islam, seperti konflik Suriah dan Palestina.

Kedua, OKI harus menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekuitabilitas kesejahteraan dunia. Mengutip pernyataan SBY dalam sambutan di KTT ke-12 OKI, "Negara-negara OKI memiliki dua pertiga migas dunia, kombinasi GDP kita merepresentasikan 8,3 persen dari ekonomi global. Kita bisa berbuat lebih banyak, karena ada fakta sebagian besar umat berada di bawah garis kemiskinan." Apa yang disampaikan SBY ini adalah fakta yang menarik. Artinya, sebenarnya negara-negara Islam memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan global.

Ketiga, OKI harus menjadi *net contributor* dalam mendorong demokrasi untuk mempromosikan dan memproteksi HAM.

Tiga poin yang disampaikan SBY tersebut sejalan dengan tujuan umum didirikannya OKI, yaitu mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan negara-negara Islam, serta mengkonsolidasikan segenap upaya untuk memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama OKI untuk pemajuan HAM?”

C. Landasan Teori

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.¹² Sehingga teori pasti hasil dari gabungan beberapa konsep yang membentuk suatu kesimpulan.¹³ Kerangka dasar teori diperlukan dalam penulisan karya ilmiah sebagai dasar penulisan skripsi ini.

Untuk menjelaskan permasalahan yang telah penulis rumuskan, penulis menggunakan:

C.1. Teori Kerjasama Internasional

Dalam melihat suatu keterkaitan peningkatan suatu hubungan antar negara dalam sebuah Organisasi Internasional sangatlah erat bila menggunakan Teori

¹¹Peran Strategis Indonesia di OKI oleh Tole Sutrisno Penulis adalah Peneliti, Direktur Operasional Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia. 11:55 WIB dalam Jurnal Obornews.com hal: [dihttp://m.obornews.com/page/category/?page=9&id=16846](http://m.obornews.com/page/category/?page=9&id=16846) diakses, 28 Feb 2015

¹² Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal.186.

¹³ Ibid, hal. 93-94.

Kerjasama Internasional dalam penelitian ini. Dikarenakan seluruh Negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing.

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati, kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya, keamanan maupun dalam bidang hak asasi suatu negara. Dan dapat berjaln oleh suatu negara dengan satu atau lebih dengan negara-negara lainnya. Hubungan dan Kerjasama Internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama Internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan negara lainnya.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :¹⁴

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
- b) Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.

¹⁴K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hlm 625-653

- c) Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk meencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.¹⁵

Disamping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengetahui kerjasama internasional, Koesnadi Kartasmita mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.¹⁶

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

¹⁵Robert Keohane dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005.hlm 63-64

¹⁶Koesnadi Kartasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977,hlm 19

*“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”.*¹⁷

Dari sebuah Kerjasama internasional yang berkaitan dengan keorganisasian maka pada hakekatnya kerjasama yang diutarakan ialah Kerjasama Multilateral yakni hakekat dan kerjasama internasional yang universal (global) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan bangsa-bangsa dalam cita-cita bersama dan menghindari konflik internasional.¹⁸

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokkan ataupun konflik memang tidak dapat dihindari, tapi dapat ditekan apabila kedua pihak yang bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Dari kerangka pemikiran sebuah konsep yang dikemukakan, maka dapat diaplikasikan dalam masalah yang akan dibahas.

¹⁷K J Holsti, *International Politics, A Framework for Analysis*, New Jersey, Prentice-Hall, 1992, hlm.10

¹⁸http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/586/jbptunikompp-gdl-fahmifriz-a-29266-9-unikom_f-i.pdf diakses 26 Mei 2015 00.20 PM.

(1.a). Kerjasama Internasional

Partisipasi Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terjadi pada tahun 1970 yang bersifat dualistik berarti; di satu sisi sebagai negara terbesar Islam di dunia, dan di sisi lain, dalam konstitusinya (UUD 1945) Indonesia bukan sebagai negara Islam. Dengan demikian posisi Indonesia bersifat unik di forum OKI. Begitu juga dalam waktu yang sama, Indonesia bergabung dalam D8, perkumpulan atau asosiasi Negara-negara Islam (OKI) yang relatif maju sehingga perdagangan antarmereka (intratrade) D8 cenderung berdagang dengan negara-negara barat yang maju.

Sejak berdirinya OKI pada tahun 1969 Indonesia telah tampil sebagai teladan dimana nilai-nilai Islam dapat selaras dengan modernitas dan demokrasi. dan sebagai anggota Indonesia senantiasa menekankan beberapa hal penting dalam agenda OKI, antara lain pemberdayaan potensi kapasitas negara-negara anggota OKI dalam memainkan perannya memelihara perdamaian dan keamanan global, serta peningkatan upaya pemberantasan kemiskinan dan percepatan pembangunan. Indonesia juga mendorong pemahaman bahwa Islam sebagai agama perdamaian dan bertoleransi tinggi, selaras atau compatible dengan demokrasi, dan modernitas maupun HAM .

Dengan predikat tersebut, Indonesia dapat mengambil sejumlah peluang dengan menjadikan OKI sebagai Organisasi multilateral non-PBB yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan Indonesia di kancah internasional. Melalui OKI, Indonesia juga dapat menawarkan program-program nasional yang bisa dikembangkan oleh negara-negara anggota OKI lainnya. Sebagai contoh peningkatan pembangunan ekonomi, program anti korupsi, *Good Governance*, penegakkan HAM,

dan hak-hak perempuan. Peluang Indonesia untuk memimpin OKI semakin terbuka pada KTT OKI tahun 2014 yang diselenggarakan di Jakarta. Pemerintah Indonesia memiliki modal dasar yang kuat terkait peranan-peranan di dunia internasional. Pertama, sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia menjadi kekuatan penting pada abad ke 21 terkait dengan pembangunan demokrasi. Di dunia Islam selain Malaysia dan Turki. Konsep demokrasi dan toleransi sulit diterapkan secara penuh oleh negara-negara anggota OKI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya konflik kekerasan hingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit dalam pelaksanaan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Kedua, sebagai ketua ASEAN, posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Permasalahannya adalah mampu tidaknya pemerintah mengelola potensi strategis sebagai ketua ASEAN tersebut. Ketiga, Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia dan kawasan sekitarnya. Dalam hal tersebut Indonesia dipandang mampu untuk berperan sebagai teladan (*role of model*) untuk negara-negara anggota OKI lainnya .

C.2. Teori Peran (*Role Theory*)

Peran(*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. Teori peranan menjelaskan bahwa “ perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.”¹⁹Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik.

¹⁹Mohtar Mas'ood, “Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi” , Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,1998, hlm.44.

Menurut Alan Isaak, harapan itu bisa muncul dari dua jenis sumber. Pertama, itu bisa berasal dari harapan yang dipunyai orang lain terhadap seorang aktor politik. Artinya setiap masyarakat pasti memiliki suatu gagasan tentang apayang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik. Kedua, harapan itu juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya. Gagasan ini sebagian besar mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian yang di kembangkan sebelum ia memegang peranan itu.

(2.a). Aplikasi Peran

Berlandaskan teori peran, dapat dipahami bahwa Indonesia dapat berperan banyak dalam keanggotaannya pada OKI. Keberadaan OKI sendiri untuk Indonesia telah dikemukakan pada latar belakang diatas adalah sebagai wahana untuk menunjukkan citra positif Islam moderat seperti yang dianut di Indonesia ke hadapan masyarakat Internasional. Lebih jauh lagi, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan seoptimal mungkin keberadaan OKI untuk menggalang dukungan bagi Indonesia, tidak hanya sekedar untuk mengamankan posisi RI, tetapi juga dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD RI tahun 1945.²⁰

Krisis politik yang melanda negara-negara anggota OKI sejak awal Januari 2011 menunjukkan bahwa dunia Islam saat ini membutuhkan role of model dalam proses transisi dan demokrasi. Sebagai salah satu anggota OKI dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah.

²⁰Ibid

Indonesia dipandang mampu untuk berperan sebagai teladan (*role of model*) bagi keserasian antara Islam, modernitas dan demokrasi damai, serta sebagai bridge builder hubungan Barat dan Islam. Tuntutan untuk ikut berperan dalam upaya perdamaian bagi Negara-negara anggota termasuk Indonesia sejalan dengan *Mecca Declaration and Ten-Years Program of Actions Organization of The Islamic Conference (TYPOA-OIC)* yang tidak hanya fokus pada isu politik, tetapi juga isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Pada tanggal 20-24 Februari 2012 Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai tuan rumah Sesi Pertama Komisi HAM Permanen dan Independen OKI (OIC - *Independent Permanent Human Rights Commission/ IPHRC*). Sesi Pertama IPHRC OKI ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta.

Kepercayaan tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap peran aktif Indonesia dalam mendorong pentingnya kerja sama OKI untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara anggotanya, termasuk melalui pembentukan IPHRC OKI. Sesi Pertama IPHRC OKI di Jakarta ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia untuk mempercepat berfungsinya IPHRC OKI dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang HAM di dunia Islam.²¹

²¹Pikiran Rakyat Jurnal Edisi Sabtu, 18-02-2012 - 20:19 Tersedia dalam: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/177452>

Tabloid Diplomasi Jurnal Edisi - Maret 2012 Monday, 19 March 2012 22:44 Tersedia dalam: <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/169-maret-2012/1357-indonesia-mendorong-kerjasama-oki-meningkatkan-pemajuan-ham.html> diakses. Minggu, 1 Mar, 2015 07:40:25 PM

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan serta kerangka dasar teori maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara bahwasannya, bagaimanaperan Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kerjasama OKI untuk pemajuan HAM, adalah:

1. Keterlibatan masyarakat sipil (*civil society*) berkomitmen kuat mendorong Komisi Permanen Independen HAM (*Independent Permanent Human Rights Commission, IPHRC*) Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
2. keikutsertaan Komnas HAM perempuan suatu bentuk kerjasama nasional atas dukungan dan komitmen politik yang termasuk dalam komponen *civil society* dalam berperan memaksimalkan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, penegakan HAM, terutama di negara-negara anggota OKI”.

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Memenuhi kewajiban akademis yang harus ditempuh penulis sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengetahui bahwa Indonesia memiliki peran sentral di OKI dalam mendorong kerjasama untuk meningkatkan pemajuan HAM.
3. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori dan membuktikan hipotesa yang ada.
4. Untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai upaya dalam mendorong kerjasama Indonesia OKI demi meningkatkan pemajuan HAM maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah sejak krisis politik yang melanda negara negara anggota OKI sejak awal Januari 2011 masa jabatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode ke Dua pada tahun 2011 hingga tahun 2014 dalam Peluang Indonesia untuk memimpin OKI semakin terbuka pada KTT OKI 2014 yang diselenggarakan di Jakarta.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dibutuhkan

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah masalah peran sebuah negara dengan pokok pembahasan mengenai peran Indonesia dalam mendorong kerjasama OKI untuk meningkatkan pemajuan HAM pada masa pemerintahan SBY (*The Role of Indonesia's in Encourage Cooperation of Organization of Islamic Cooperation/OIC to Improve The Human Rights Progress of The Reign Susilo Bambang Yudhoyono*).

Dengan demikian maka data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa terutama adalah: Data latar belakang peranan indonesia dalam berkontribusi terhadap OKI sebagai teladan (*role of model*) pada negara islam didunia, data konsep diplomasi Indonesia terhadap organisasi islam dunia, dan tentang peningkatan pemajuan hak asasi manusia terhadap kawasan timur tengah pada konflik atas dasar transisi demokrasi yang terjadi, serta data tentang konsep teori kerjasama International, national interest serta teori peran, dan data tentang OKI.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti yang disebutkan diatas, maka dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat, mengabadikan, memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

3. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah pembahasan yang akan diteliti.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual), sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara lahiriah berujud susunan kata dan kalimat yang dituangkan dalam skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah karya penelitian dapat dikatakan ilmiah atau tidak salah satunya dilihat dari sistematika penulisan. Dengan demikian penulisan yang sistematis menjadi salah satu syarat mutlak untuk kaidah penelitian yang ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Akan membahas tentang OKI serta keanggotaan Indonesia dalam OKI.

BAB III, Akan membahas tentang kontribusi peranan Indonesia terhadap organisasi kerjasama Islam yang mana Indonesia sebagai role of model serta bridge builger hubungan barat dan Islam bagi Negara Islam lainnya.

BAB IV,Akan membahas mengenai upaya kerjasama dalam peran Indonesia di OKI untuk pemajuan HAM.

BAB V, berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dibahas, serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup skripsi.